

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang ada pada Bab III dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor cukup berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah DKI Jakarta karena satu per lima Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Jika Pajak Kendaraan Bermotor dihilangkan dari Pajak Daerah yang ada saat ini, maka hal ini akan berpengaruh cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh PemProv DKI Jakarta. Hal ini sama dengan pada tahun 2020, dimana pada tahun 2020 Pajak Kendaraan Bermotor juga berkontribusi sebesar 21,5% dan sama halnya pada tahun 2021 yang berkontribusi sebesar 20,66% terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Dampak Pandemi Covid-19 yang ditimbulkan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta pada tahun 2020 membuat penerimaan tidak terealisasi sesuai target dan berdampak kepada ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Dampak selanjutnya yang ditimbulkan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2021 justru membaik, karena adanya beberapa Insentif yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga membuat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah DKI Jakarta mengalami kenaikan sebesar 9,59% dibandingkan tahun 2020.

3. Kepatuhan pembayaran masyarakat di masa pandemi dinilai cukup baik jika dilihat dari seberapa besar realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap target yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PemProv DKI Jakarta mempunyai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp8,8 triliun dan realisasi penerimaan sebesar Rp8,63 triliun yang berarti realisasi penerimaan hanya sebesar 98,12% daripada yang ditargetkan. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan masyarakat cukup baik walaupun target belum memenuhi 100%.